

KAJIAN PERENCANAAN WILAYAH MELALUI PROGRAM PNPM MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh : **Supardi Nani**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menyusun kajian perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan berbasis desa dan dalam mensinergikan pelaksanaan program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone Bolango.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi kepada responden terpilih mengenai keadaan masyarakat dan potensi desa; (2) diskusi terfokus. Metode ini dilakukan dengan stakeholder terkait membahas kemungkinan pengembangan wilayah yang ada di Kecamatan dan desa sasaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertajam kajian dan pengumpulan data di lapangan; (3) Analisis. Analisis yang digunakan dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah adalah analisis SWOT dan tabulasi frekuensi serta metode pemberdayaan dengan menggunakan sistem *bottom up*.

Kata Kunci : Perencanaan wilayah, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bone Bolango di bagian selatannya yang dibatasi oleh teluk tomini, mempunyai sumber daya kelautan/perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sumber daya ini telah menciptakan kesenjangan antara golongan pelaku usaha, khususnya antara perikanan rakyat dan perikanan modern. Penduduk yang berada di kawasan pesisir yang didorong oleh tekanan pertumbuhan dan kemiskinan dikhawatirkan akan mengeksploitir sumber daya yang tidak ramah lingkungan, sebagai akibat dari kurangnya kemampuan untuk memperoleh sumber daya produksi lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango memprogramkan Pemberdayaan Ekonomi Sosial Budaya Usaha Perikanan Masyarakat Pesisir PNPM-MKP terutama dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah bidang kelautan agar supaya pembangunan Masyarakat pesisir dapat terencana dan berkelanjutan sesuai keinginan masyarakat setempat. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan peningkatan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango, telah ditetapkan Kecamatan Kabila Bone sebagai lokasi sasaran program PNPM Mandiri KP. Penetapan lokasi ini lebih difokuskan pada Desa Olele, Botutonuo dan Modelomo. Alasan utama penentuan lokasi tersebut karena lebih dekat dengan akses modal, teknologi, dan pasar, di samping potensi sumber daya yang tersedia di daerah tersebut memungkinkan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan kajian perencanaan pengembangan wilayah ini didasarkan pada identifikasi potensi sumber daya kelautan dan masyarakat serta kajian terstruktur yang dilakukan bersama stakeholder terkait. Diharapkan dokumen ini akan mampu dijadikan dasar kebijakan dan program oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan

1. Masyarakat yang tinggal di pesisir kecamatan Kabila Bone dikategorikan sebagai masyarakat miskin.
2. Penetapan daerah sasaran terdapat di Kecamatan Kabila Bone dengan 3 (tiga) desa sasaran. selama ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan masyarakat yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kegiatan ini adalah: menyusun kajian perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan berbasis desa dan dalam mensinergikan pelaksanaan program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone Bolango.

Adapun manfaat kegiatan ini adalah:

1. Manfaat teoritis, diharapkan akan mampu mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan perencanaan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Wilayah

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi ini dilaksanakan untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat

2. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Desa.
Kegiatan ini berupa penyusunan rencana dalam rangka pengelolaan wilayah dan sumber kelautan dan perikanan berbasis desa dilakukan melalui mekanisme FGD (Focus Group Discussion) setelah diadakannya identifikasi dan inventarisasi kegiatan konsultasi sebagai pendamping masyarakat.

Dari kegiatan ini dapat diperoleh hasil tentang gambaran umum dan rincian berbagai kebutuhan masyarakat terkait :

1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dibidang kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan kapasitas aparat daerah
3. Peningkatan akses kredit mikro
3. Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan mulai awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan yang sudah selesai.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN METODOLOGI

Kerangka Konseptual

Dalam perencanaan pembangunan, pendekatan wilayah dimaksudkan untuk melihat pemanfaatan ruang serta interaksi sebagai kegiatan dalam ruang wilayah sehingga terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya. Perencanaan pembangunan juga memperhatikan bagaimana ruang tersebut saling berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi dapat terjadi karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi dan perbedaan aktivitas utama pada masing-masing ruang yang harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang.

Pendekatan wilayah dalam pengertian sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya, yang melalui analisis diketahui bahwa masih ada ruang yang belum dimanfaatkan atau penggunaannya masih belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa yang sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut sehingga penggunaan ruang tersebut menjadi serasi dan efisien, dan memberikan kemakmuran yang optimal bagi masyarakat. Kegiatan pendekatan wilayah ini bukan hanya mengidentifikasi fenomena atau hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi wilayah, namun juga pemahaman dan perumusan bagaimana mengembangkan kegiatan sektor-sektor sosial budaya, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya buatan, perlindungan lingkungan sesuai dengan kondisi sumber daya manusia, pengembangan pemukiman serta rumusan pengembangan infrastruktur pendukung seperti sistem transportasi secara terpadu yang dituangkan dalam perencanaan.

Pendekatan wilayah dewasa ini telah mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Pada paradigma lama di mana implementasi pembangunan didasarkan pada pembangunan terencana, *top-down approach* dengan dominasi arahan pemerintah, maka pada paradigma baru di era otonomi diperlukan pembangunan yang interaktif, *bottom-up approach*, dan *participatory*. Dengan demikian, penataan ruang wilayahpun tidak lagi lebih *top-down approach* akan tetapi harus lebih desentralisasi dan pemerintah harus bersama masyarakat menciptakan rencana, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah harus proaktif dan bijaksana dalam menata ruang secara transparan dan diketahui oleh semua kelompok masyarakat. Pendekatan wilayah sebagai basis perencanaan pengembangan wilayah harus diorientasikan kepada: kemampuan bertindak lokal dalam kerangka berpikir global, memperhitungkan kelayakan masa kini dalam pertimbangan masa depan, lebih fleksibel dan dinamis dalam *framework* yang pasti. Pendekatan wilayah harus mampu memfokuskan pada masyarakat setempat dengan memanfaatkan keterlibatan masyarakat luas termasuk para akademisi, investor, budayawan, praktisi, dan lain-lain.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wilayah di Kecamatan Kabila Bone adalah:

- Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi kepada responden terpilih mengenai keadaan masyarakat dan potensi desa.
- Diskusi terfokus. Metode ini dilakukan dengan stakeholder terkait membahas kemungkinan pengembangan wilayah yang ada di Kecamatan dan desa sasaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertajam kajian dan pengumpulan data di lapangan.
- Analisis. Analisis yang digunakan dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah adalah analisis SWOT dan tabulasi frekuensi serta metode pemberdayaan dengan menggunakan sistem *bottom up*.

GAMBARAN KONDISI WILAYAH

Implementasi PNPM mandiri KP di Kabupaten Bone Bolango, ditetapkan berdasarkan nota Dinas Kelautan dan Perikanan bertempat di 3 (tiga) desa di Kecamatan Kabila Bone. Ketiga desa tersebut yakni Desa Olele, Desa Bototonuo dan Desa Modelomo. Secara singkat profil ketiga desa tersebut sebagai berikut:

1. Desa Olele

Secara geografis desa Olele memiliki luas 1542 Ha yang terbagi atas 4 dusun. Desa ini berpenduduk 984 jiwa yang terdiri atas 516 jiwa penduduk pria dan 468 penduduk wanita. Desa olele memiliki batas sebagai berikut:

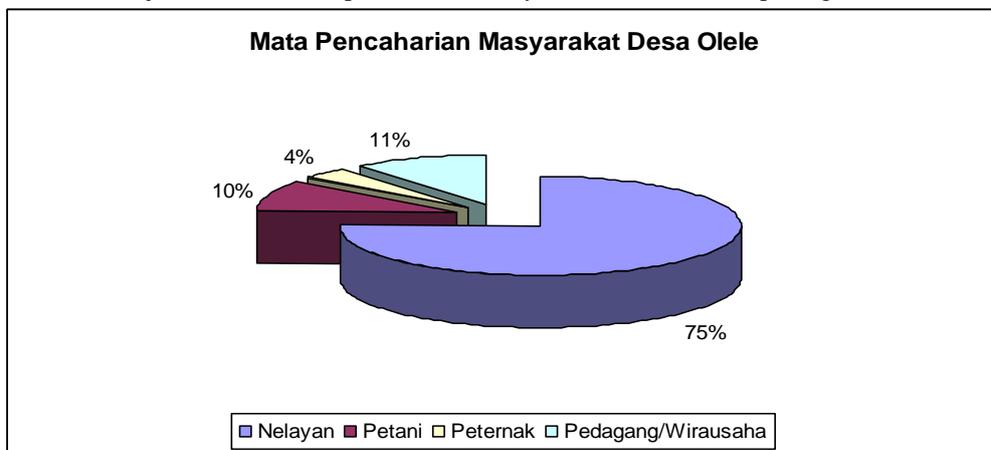
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Oluhuta
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Dusun Huliya Desa Oluhuta
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tolotio
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Teluk Tomini

Desa Olele terkenal di Provinsi Gorontalo sebagai daerah wisata Bahari.

Jika diperhatikan keadaan pendidikan, dapat diperoleh informasi bahwa Desa Olele memiliki sarana sekolah: SD dan SMP masing-masing berjumlah 1 (satu) unit. Sedangkan jumlah siswa yang bersekolah dari Desa Olele, untuk tingkat SD berjumlah 149 siswa, tingkat SMP berjumlah 62 siswa dan tingkat SMA berjumlah 15 siswa. Adapun ketersediaan Guru yang ada di daerah ini berjumlah 17 orang yang tersebar di 2 (dua) sekolah tersebut.

Di bidang kesehatan, Desa Olele memiliki Puskesmas Pembantu sebanyak 1 (satu) unit, Poliklinik Desa berjumlah 1 (satu) unit dan ketersediaan tenaga Perawat hanya 1 (satu) orang sedang dokter tidak ada.

Mayoritas penduduk Desa Olele beragama Islam, sehingga keberadaan tempat ibadahpun hanya 1 (satu) mesjid. Dari sisi mata pencaharian masyarakat Desa Olele dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas diperoleh informasi bahwa 75 persen atau sekitar 225 orang adalah nelayan, 11 persen atau 32 orang bekerja sebagai pedagang/wirusaha, 10 persen atau 29 orang sebagai petani dan 4 persen atau 12 orang sebagai peternak.

Dari jumlah nelayan yang ada di Desa Olele, 95 persen atau 215 orang adalah nelayan tangkap, sedang 5 persen atau 10 orang adalah nelayan pengolahan hasil perikanan. Jumlah nelayan tangkap tersebut, 161 orang diantaranya memiliki alat tangkap sedang sisanya 54 orang belum memiliki alat tangkap.

Adapun Katintin yang beroperasi di Desa Olele ini berjumlah 110 unit dengan jumlah kapal penangkap 1 (satu) unit. Nelayan di desa ini tidak memiliki Rumpon. Jenis Ikan yang dominan sebagai komoditas bidang perikanan di Desa Olele adalah : Tuna, Cakalang, Suntun, dan Ikan Batu.

2. Desa Botutonuo

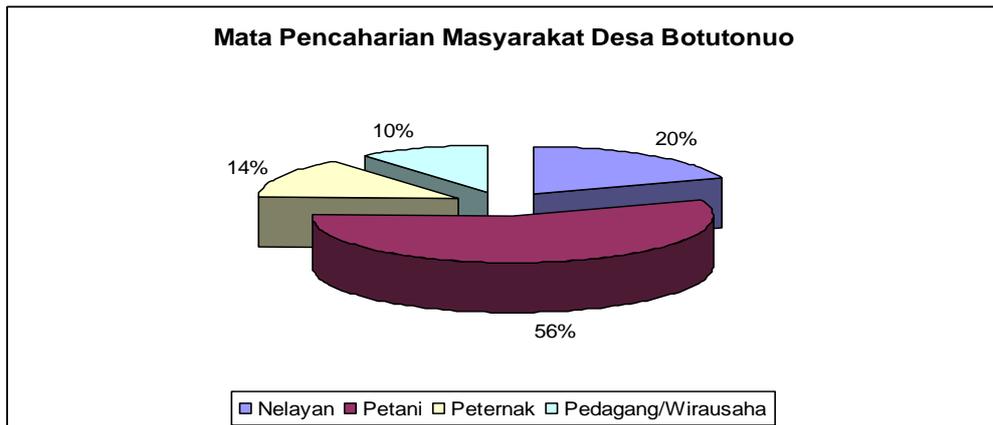
Desa Botutonuo memiliki luas 3100 Ha yang terbagi atas 4 dusun. Desa ini berpenduduk 1048 jiwa yang terdiri atas 516 jiwa penduduk pria dan 532 penduduk wanita. Desa Botutonuo memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Libungo
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Molotabu
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Modelomo

Jika diperhatikan keadaan pendidikan, dapat diperoleh informasi bahwa Desa Botutonuo hanya memiliki 1 (satu) unit sarana sekolah Dasar. Sedangkan jumlah siswa yang bersekolah dari Desa Botutonuo, untuk tingkat SD berjumlah 153 siswa, tingkat SMP berjumlah 57 siswa dan tingkat SMA berjumlah 25 siswa. Adapun ketersediaan Guru yang ada di daerah ini hanya berjumlah 3 orang.

Di bidang kesehatan, Desa Botutonuo memiliki Puskesmas 1 (satu) unit dan ketersediaan tenaga Perawat hanya 1 (satu) orang sedang dokter tidak ada.

Mayoritas penduduk Desa Botutonuo beragama Islam, sehingga keberadaan tempat ibadahpun hanya 1 (satu) mesjid. Dari sisi mata pencaharian masyarakat Desa Botutonuo dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa sebagian besar masyarakat adalah petani yakni 56 persen atau 129 orang, 20 persen atau 45 orang sebagai nelayan, 14 persen atau 32 orang sebagai peternak, dan 10 persen atau 24 orang sebagai pedagang/wirausaha.

Semua nelayan yang tergambar di atas adalah nelayan tangkap. Sedangkan nelayan yang memiliki alat tangkap hanya berjumlah 12 orang dan jumlah katintin yang beroperasi hanya 9 (sembilan) unit. Adapun rumpun dan kapal penangkap, tidak ditemukan di desa ini. Jenis ikan yang dominan yang merupakan komoditas unggulan perikanan di Desa Botutonuo adalah : Oci dan Lajang.

3. Desa Modelomo

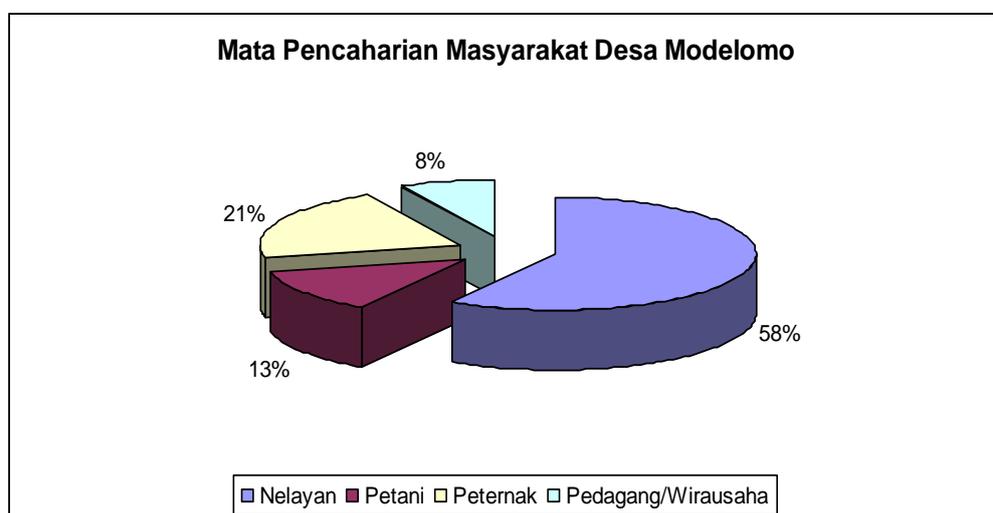
Ada yang unik di Desa Modelomo. Antara pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen kontradiktif. Pemerintahannya terbilang cukup disiplin dalam hal administrasi. Namun benarkan masyarakatnya adalah *destroyer*? Kondisi ini sebenarnya merupakan hipotesis belaka. Konon kata orang masyarakatnya adalah perusak karang di laut untuk diperjual belikan guna menambah penghasilan keluarga. Jika tindakan ini kemudian dianggap tidak terpuji, apa alternatif pekerjaan yang terpuji?

Desa Modelomo memiliki luas 2023 Ha yang terbagi atas 3 dusun. Desa ini berpenduduk 980 jiwa yang terdiri atas 494 jiwa penduduk pria dan 486 penduduk wanita. Desa Modelomo memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bulontala Kec. Suwawa
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Botutonuo
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Biluango

Jika diperhatikan keadaan pendidikan, dapat diperoleh informasi bahwa Desa Modelomo hanya memiliki 1 (satu) unit sarana sekolah Dasar. Sedangkan jumlah siswa yang bersekolah dari Desa Modelomo, untuk tingkat SD berjumlah 146 siswa, tingkat SMP berjumlah 47 siswa dan tingkat SMA berjumlah 28 siswa. Adapun ketersediaan Guru yang ada di daerah ini berjumlah 12 orang. Di bidang kesehatan, Desa Modelomo tidak memiliki sarana dan prasarana kesehatan (puskes, polindes, dokter dan perawat).

Mayoritas penduduk Desa Modelomo beragama Islam, sehingga keberadaan tempat ibadahpun hanya 1 (satu) mesjid. Dari sisi mata pencaharian masyarakat Desa Modelomo dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar di atas, dapat diinformasikan bahwa 58 persen atau 106 masyarakat Modelomo bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap, 21 persen atau 38 orang sebagai peternak, 13 persen atau 23 orang sebagai petani dan 8 persen atau 14 orang sebagai pedagang/wirausaha.

Kondisi ini jika dikaitkan dengan kondisi:

- Jumlah nelayan yang memiliki alat tangkap sejumlah 8 orang.
- Jumlah Katintin 13 unit
- Jumlah Rumpon 2 unit dan
- Kapal Penangkap 4 unit

Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan yang ada di Desa Modelomo sebagian besar adalah buruh/ karyawan yang bekerja pada usaha orang lain/ perusahaan yang lebih mapan karena memiliki keterbatasan akses modal dan manajemen.

Adapun jenis ikan dominan yang merupakan komoditas unggulan di Desa Modelomo adalah Oci dan Lajang.

Gambaran Pemberdayaan Masyarakat

Gambaran pemberdayaan masyarakat untuk PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone Bolango diawali oleh kegiatan sosialisasi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Sosialisasi ini diarahkan agar program ini mampu memberikan kesamaan pemahaman tentang pemberdayaan antara pemerintah dan masyarakat sasaran. Kegiatan ini tentunya juga diharapkan akan menghasilkan output yang secara sinergi membangun kemandirian di tingkat masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan.

1. Peningkatan Kapasitas masyarakat bidang kelautan dan perikanan

Kegiatan ini diarahkan pada bangkitnya kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan:

- Identifikasi karakteristik wilayah dan masyarakat guna melakukan penggalian isu dan *root problem* yang dialami selama ini. Tahapan ini dilakukan oleh Konsultan dan Tim Pendamping Desa (TPD) melalui kegiatan FGD dan wawancara mendalam dengan masyarakat calon pemanfaat PNPM mandiri KP. Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh pula kebutuhan yang mendasar masyarakat nelayan berdasarkan menu dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pertemuan tingkat Desa yang dilakukan masing-masing di desa Olele, desa Botutonuo, dan desa Modelomo. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang: 1) Arah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan PNPM mandiri KP, 2) Mekanisme dan kriteria penerima pemanfaat bantuan langsung masyarakat (BLM), 3) Pemetaan kemiskinan dan identifikasi potensi pengembangan wilayah, 4) Proses pengambilan keputusan berdasarkan eksploitasi informasi bottom up. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat akan semakin merasa memiliki atas program PNPM mandiri KP, sehingga masyarakat semakin kreatif dalam menjalankan kegiatan ini menuju pada kemandirian. Dalam kegiatan ini, partisipasi seluruh masyarakat yang hadir sangat diharapkan dalam memberikan masukan yang konstruktif demi suksesnya program.
- Pertemuan tingkat Kecamatan, kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ketua kelompok, konsultan, TPD dan unsur terkait lain dalam membahas berbagai kebijakan guna suksesnya PNPM mandiri KP di Kabupaten Bone Bolango.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

Peningkatan kapasitas aparatur daerah sangat dibutuhkan dalam rangka menyamakan persepsi dan tindakan yang mengarah pada keberhasilan program PNPM-MKP tahun 2009.

3. Peningkatan Akses Kredit Mikro

Modal merupakan faktor utama berhasilnya suatu usaha. Keberadaan modal kerja selama ini yang digunakan oleh para nelayan yang ada dipesisir, masih mengandalkan pada modal sendiri yang jumlahnya terbatas. Di samping itu kemampuan masyarakat dalam mengakses keuangan mikro masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya pengelolaan keuangan yang baik serta lebih berorientasi pada kegiatan konsumtif belaka. Di sisi lain kepercayaan lembaga keuangan bank masih sangat rendah untuk menyalurkan dana kemasyarakat. Menurut informasi yang diperoleh bahwa pihak perbankan belum bisa menyalurkan kredit kepada nelayan. Alternatif yang tepat untuk keluar dari masalah permodalan ini, maka dibutuhkan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan mikro yang diharapkan nantinya akan bisa membantu nelayan untuk memperoleh dan menambah modal kerjanya yang diawali oleh pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akses keuangan mikro dan pengelolaan keuangan yang berorientasi investasi.

Selama ini berdasarkan identifikasi yang dilakukan di 3 (tiga) desa sasaran (Olele, Botutonuo, dan Modelomo) belum terdapat adanya lembaga keuangan mikro maupun koperasi. Oleh karena itu hal yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan teknis pengelolaan keuangan dan akses kredit mikro bagi aparat dan masyarakat setempat.

PERENCANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Perencanaan Wilayah secara umum

Dalam mempertajam analisis perencanaan wilayah, maka dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apapun persepsi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, maka sebagai sumber ekonomi baru yang kompetitif haruslah bermuara pada pengurangan kemiskinan masyarakat.
- 2) Fokus kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumber ekonomi baru harus berangkat pada pemikiran untuk meningkatkan pembangunan kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal yang ada.
- 3) Sedin mungkin membuat rambu-rambu pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus mampu mentransformasikan berbagai usaha perikanan masyarakat ke arah bisnis dan swasembada secara menyeluruh dan terpadu, pendekatan menyeluruh (holistik) dan terpadu ini berarti melihat usaha perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Sumberdaya perikanan, yaitu sumberdaya alam (baik yang berada di laut, pesisir, perairan tawar), SDM, dan sumberdaya buatan. n penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pabrik es, cold storage, infrastruktur pada sentra industri, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti BBM, benih, mesin dan alat lengkap), serta.
2. Sarana dan prasarana, meliputi perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pabrik es, cold storage, infrastruktur pada sentra industri, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti BBM, benih, mesin dan alat lengkap), serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien.
3. Produksi perikanan, meliputi usaha budidaya dan penangkapan yang menyangkut usaha perikanan skala kecil maupun besar.
4. Pengelolaan hasil perikanan, meliputi kegiatan pengelolaan sederhana yang dilakukan oleh petani dan nelayan tradisional hingga pengolahan dengan teknologi maju di pabrik yang mencakup penanganan pasca panen sampai produk siap dipasarkan.
5. Pemasaran hasil perikanan, meliputi kegiatan distribusi dan pemasaran hasil-hasil perikanan atau olahannya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk pula didalamnya kegiatan pemantauan distribusi informasi pasar (*market development*) dan pengembangan produk (*product development*).
6. Pembinaan, mencakup kegiatan pembinaan institusi, iklim usaha yang kondusif, iklim poleksosbud yang mendukung, peraturan dan perundangan yang kondusif, pembinaan SDM, serta kepemimpinan yang baik agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai seefektif mungkin.

Analisis SWOT

Berdasarkan latar belakang dan gambaran kondisi wilayah yang ada di desa Modelomo, desa Botutonuo dan Desa Olele Kecamatan Kabila Bone, maka dapat dianalisis beberapa faktor baik internal maupun eksternal melalui dimensi karakteristik kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

- Sumberdaya kelautan dan perikanan sangat potensial
- Memadainya jumlah penduduk.
- Banyaknya ragam produk yang dapat dihasilkan dari bahan baku Ikan seperti: ikan asin, ikan asap, abon, dll.
- Adanya kerjasama antar aparat.
- Ketersediaan prasarana jalan darat dan lancarnya komunikasi.

b. Kelemahan (Weeknesses)

- Rendahnya kualitas SDM dari sisi produktifitas dan pendidikan
- Daya saing produk di tingkat regional sangat rendah.
- Tingginya tingkat kemiskinan.
- Belum optimalnya aparaturnya dalam mendukung pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Kurangnya pemanfaatan teknologi tinggi dalam penangkapan, budidaya dan mutu produk.
- Kurang terbinanya keberlanjutan pembinaan dan pelatihan.

- Sarana komunikasi, informasi dan strategi pemasaran masih rendah.
- Belum terjalinnya hubungan baik antara dunia usaha, Pemda dan Perguruan Tinggi.
- Belum fokusnya penetapan komoditas dan industri unggulan.
- Akses kredit mikro dan pemahaman manajemen keuangan masih rendah dalam mengakses modal usaha.

c. Peluang (Opportunities)

- Tersedianya potensi yang besar untuk hasil kelautan dan perikanan untuk dikembangkan.
- Tersedianya cukup potensi untuk mengembangkan produk lain seperti pertanian, pertambangan, perkebunan peternakan serta pariwisata.
- Keberadaan institusi pendidikan di daerah semakin terbuka dengan kekhususan di bidang kelautan dan perikanan.
- Perkembangan teknologi yang semakin pesat.
- Perluasan akses dari keberadaan lembaga keuangan dan perbankan.
- Terbukanya akses pemasaran baik lokal, nasional dan internasional.
- Eksisnya keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

d. Hambatan (Threats)

- Terbatasnya Modal Usaha.
- Lemahnya sistem hukum negara yang terkait dengan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
- Sistem adat dan norma agama yang berlaku.
- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah.
- Struktur ekonomi dan pasar belum diatur secara baik.
- Kurang kompetitifnya produk kelautan dan perikanan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung usaha di bidang kelautan dan perikanan.

B. Perencanaan peningkatan kapasitas masyarakat bidang kelautan dan perikanan

1. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat :
 - Teknik pembuatan dan pemeliharaan kapal.
 - Teknik perawatan dan perbaikan mesin
 - Teknik dan tata cara penangkapan ikan yang baik
2. Pengembangan teknologi penangkapan, meliputi pembuatan kapal tangkap,
3. Pembangunan sistem bisnis budidaya perikanan terpadu meliputi pembangunan sub-sistem perbenihan, sub-sistem usaha budidaya, sub-sistem pasca panen dan pemasaran yang ditunjang oleh pembangunan sub-sistem kesehatan ikan dan lingkungannya serta pembangunan sub-sistem prasarana budidaya perikanan.
4. Penguatan dan pengembangan teknologi budidaya meliputi jaring apung atau karamba laut, sistem rakit dan rakit dasar, serta teknologi *sea ranching* dan *sea farming*.
5. Penataan dan promosi wisata pantai
6. Revitalisasi sentra wilayah produksi perikanan
7. Perbaikan akses jalan pesisir
8. Penataan fungsi organisasi dan prasarana POKMASWAS

C. Perencanaan peningkatan kapasitas aparatur daerah

1. Pelatihan Kapasitas aparatur daerah.
2. Penguatan kelembagaan pemerintah terhadap program kelautan dan perikanan.
3. Penyusunan perangkat hukum bidang kelautan dan perikanan (Perda, Perdes)
4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan aparatur daerah terhadap PNPM Mandiri KP.

D. Perencanaan peningkatan akses kredit mikro

1. Sosialisasi dan pelatihan tentang peningkatan akses kredit mikro.
2. Pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro di tingkat desa.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung lembaga keuangan mikro.
4. Studi komperatif pengelolaan lembaga keuangan mikro.
5. Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan lainnya.

SIMPULAN

Kebijakan yang diambil dalam program PNPM Mandiri-KP di Kabupaten Bone Bolango, dilakukan dengan langkah: (1) meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat pedesaan dalam pengelolaan pembangunan; (2) memperkuat keterkaitan kawasan pedesaan dengan perkotaan serta keterkaitan sektor perikanan dan kelautan dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal; (3) memperbaiki tingkat sarana dan prasarana, serta infrastruktur penunjang pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan dipedesaan; (4) meningkatkan kapasitas pemerintahan

ditingkat lokal dalam mengelola pembangunan pedesaan secara partisipatif; (5) mengembangkan dan memantapkan kelembagaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kelautan Dan Perikanan, 2005, Kebijakan Operasional dan Program Aksi RPB 2005-2010. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango, 2009. Provinsi Gorontalo.
- Effendi Ishak. 2005, Artikel : Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta.
- Kusumastanto, T. 1998. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat*. PKSPL-IPB-Ditjen Bangda Depdagri.
- Mardismo. 2002, "New Public Managemen (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik", Jurnal SINERGI Vol. 6 No.1
- PKSPL – IPB. 2002. Penyusunan Masterplan Kawasan Etalase Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo. Kerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan PKSPL – IPB. Bogor.
- Rangkuti, F. 1998. *Analisis SWOT : Teknik Membeda Kasus Bisnis*. Cetakan Ke Tiga, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Satria, Arif. 2002. *Dinamika Modernisasi Perikanan Formasi Sosial dan Mobilisasi Nelayan*. Humoniora Utama Press. Bandung
- Tulungeng, J.J., Devi, BP. dan Rotinsulu, C. 2000. Pengembangan Persetujuan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis-Masyarakat di Sulawesi Utara. Makalah Di presentasikan pada Konferensi Nasional II: Pengelolaan Sumbaer Daya Pesisir dan Lautan, Makasar, Sulawesi Selatan. 15-17 Mei 2000.